

Sidang Tahunan IMF-WB di Bali;

Adakah Manfaatnya Bagi Indonesia?

Mendengar nama International Monetary Fund (IMF) dan *World Bank* (WB) yang terbayang dalam pikiran orang tidak jauh dari masalah utang dan “kegagalan” pemerintah melakukan percepatan *recovery* ekonomi pasca krisis tahun 1998 bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, seperti Korea, Thailand dan Malaysia. Lambatnya *recovery* ekonomi di tengarai karena resep pemulihan yang diterima oleh pemerintah dari IMF tidak tepat dosisnya, sementara negara yang mengalami krisis serupa lebih cepat pulih sebab tidak seluruhnya resep yang diberikan oleh IMF digunakan. Perasaan traumatik itu seolah masih terpelihara alam benak dan pikiran banyak orang, sehingga kedatangan direktur IMF Christine Lagarde bulan lalu ke Jakarta menemui Menteri Keuangan takayal menimbulkan spekulasi bahwa IMF akan menawarkan utang baru bagi Indonesia. Spekulasi itu tentu tidak bisa dinafikan karena disaat yang sama rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang dollar USA yang cukup dalam. Situasi ini seolah terulang kondisinya 20 tahun silam ketika direktur IMF Michael Camdessus datang ke Indonesia “memaksa” Presiden Soeharto menandatangani *Letter of Intent (LoI)* untuk menerima bantuan (utang) dalam rangka mengatasi krisis ekonomi di Indonesia yang juga bermula dari pelemahan rupiah. Setal tiga uang, keberadaan Bank Dunia (*World Bank*) juga identik dengan utang dan cenderung dipahami banyak melakukan intervensi kebijakan ekonomi di Indonesia yang mengarahkan pada praktek liberalisme ekonomi. Apalagi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawaty “alumni” *World Bank*, alhasil kebijakan ekonomi Indonesia saat ini dianggap banyak mengadopsi --portofolio-- dari *World Bank* yang makin jauh dari “sistem ekonomi Indonesia”. Persepsi negatif itu tentu saja tidak sepenuhnya dapat dihilangkan, namun diperlukan penegasan bahwa IMF dan WB memiliki mandat yang berbeda bukan mengurus masalah pinjaman semata. IMF memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong kerja sama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan serta bantuan teknis untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. Sementara *World Bank* lebih

banyak berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan, termasuk mendorong perbaikan lembaga pemerintah. Dalam perkembangannya baik IMF maupun WB telah mengalami transformasi kelembagaan, dan Indonesia sendiri telah menyelesaikan utangnya terhadap IMF. Akan tetapi Indonesia masih tetap bertahan sebagai bagian dari keanggotaan IMF demikian juga dengan di *World Bank*. Perubahan mendasar dari IMF dapat dilihat dari sisi kelembagaan maupun saran kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi melakukan duplikasi yang kerap diterapkan di negara yang berbeda (*one for all*). Reformasi kelembagaan IMF sendiri telah dimulai pasca sidang tahunan 2006 di Singapura, dengan menghasilkan ketetapan utama tentang perubahan hak suara bagi negara-negara anggotanya. Jika selama ini kuota atau kekuatan voting di dominasi oleh negara-negara maju dialihkan kepada negara-negara berkembang yang ekonominya cukup dinamis, sekalipun USA tetap memegang kendali, memiliki hak veto atas keputusan-keputusan penting. Maka disini menjadi jelas bahwa IMF-WB tugas pokok kedua lembaga keuangan internasional tersebut harus berevolusi seiring dengan perkembangan ekonomi dan tantangan baru yang dihadapi oleh dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan. WB terbukti banyak menyediakan bantuan teknis dan keuangan untuk membantu berbagai negara melakukan reformasi sektor - sektor tertentu maupun proyek-proyek spesifik dalam rangka menyediakan layanan dasar. Oleh sebab itu sidang tahunan IMF-WB memiliki agenda strategi suntuk membahas isu-isu dan perkembangan ekonomi terkini, termasuk membangun kerangka kerja sama kedua lembaga maupun antar negara yang menjadi bagian keanggotaan. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan, Indonesia dipandang memiliki kestabilan ekonomi yang cukup baik, menjadi salah satu kekuatan ekonomi global, ekonomi



Oleh
Muh. Amier Arham

Indonesia menjadi lebih reformed, resilient dan progresif yang didukung oleh infrastruktur cukup memadai untuk melaksanakan MICE. Sidang tahunan IMF-WB di Bali pada tanggal 12 - 14 Oktober 2018 nanti bukan pesta perjamuan, namun bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global, serta isu-isu terkini seperti out look

ekonomi global, stabilitas keuangan global, kemiskinan, pembangunan, lapangan kerja dan perubahan iklim. Selain membahas isu-isu penting di atas, juga momentum memperkenalkan Indonesia dimata dunia internasional khususnya potensi sektor pariwisata. Di tengah kondisi ekonomi yang melambat tentu memiliki efek terhadap perekonomian nasional, karena itu dibutuhkan sumber pertumbuhan baru sebab selama ini ekspor utama Indonesia didominasi dari hasil sektor primer yang sangat *volatility*. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti, Singapura, Malaysia dan Thailand sektor pariwisata dan promosinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia, berdasarkan data BPS pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 14,04 juta lebih rendah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Diluar itu, dengan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-WB mempertegas posisi ekonomi Indonesia dimata dunia internasional bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki fundametal ekonomi yang cukup bagus, tidak seperti persepsi sebagian orang karena hanya melihat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar USA.

Sidang tahunan IMF-WB bulan Oktober 2018 di Bali tidak bisa dipandang sebagai pemborosan anggaran. Pembiayaan sidang tahunan IMF-WB merupakan bagian dari belanja pemerintah memiliki dampak nyata terhadap sektor pariwisata, khususnya Provinsi Bali dan daerah penyanggah lainnya seperti Jawa Timur, NTB, NTT. Setidaknya sidang tahunan IMF-WB akan dihadiri 189

negara anggota IMF, setiap negara akan menghadirkan otoritas fiskal, otoritas moneter, pelaku usaha, akademisi, think tank, anggota parlemen, NGO dan media, diperkirakan peserta mencapai 15.000 orang. Jumlah peserta sebanyak itu dipastikan akan membelanjakan uangnya yang tidak sedikit untuk transportasi, akomodasi serta kegiatan *leisure* lainnya. Banyuwangi Jawa Timur sendiri menargetkan paling tidak sekitar 2.000 anggota delegasi akan singgah dan sebagian delegasi memang akan datang lewat Bandara Banyuwangi. Sidang tahunan IMF-WB di Bali juga sekaligus mempromosikan kondisi ekonomi dan potensi ekonomi dikalangan dunia internasional agar investor asing tertarik untuk berinvestasi.

Kegiatan sidang tahunan IMF-WB di Bali untuk jangka pendek meningkatkan *demand leisure industry* sehingga belanja pemerintah dengan sendirinya akan menciptakan dampak ekonomi, dan jenis belanja semacam ini akan jauh memiliki manfaat bila dibandingkan dengan belanja non produkti, seperti belanja pegawai atau subsidi yang kurang tepat sasaran. Event ini diperkirakan total spending dari delegasi mencapai USD 100 juta atau setara Rp. 1,3 triliun. Hanya saja perlu dipikirkan bahwa event pertemuan tahunan IMF-WB bukan hanya Bali dan sekitarnya diuntungkan, sebagai sebuah event yang memiliki keterkaitan dengan MICE dan kepariwisataan, produk makanan dan turunannya supplynya tidak dari Bali sendiri, namun juga perlu disupply dari daerah lain, misalnya kekhasan kopi yang menjadi sajian di ajang pertemuan tersebut dapat didatangkan dari Aceh, Toraja, Lampung dan sebagainya sehingga ekonomi daerah diluar juga merasakan manfaat dari event tersebut. Ajang promosi sektor pariwisata beserta industri turunannya bukan hanya menonjolkan Bali, tetapi provinsi diluar pun wajib diperkenalkan terutama daerah prioritas pariwisata, sehingga bukan hanya Bali yang dikenal tetapi Indonesia secara keseluruhan, dikarenakan selama ini persepsi terbenam dalam pemahaman orang luar bahwa Bali bukan Indonesia, namun yang benar adalah Indonesia bukan hanya Bali. Sehingga sidang tahunan IMF-WB bermanfaat bagi Indonesia.

Penulis Adalah
Pengajar Fakultas Ekonomi UNG